

GELIAT PEKERJA SEKS

DI BAWAH TEKANAN PERDA KABUPATEN BANTUL

Hellatsani Widya Ramadhani⁴¹

Abstract

In an attempt to realize Bantul Regency's vision of becoming a prosperous, democratic and religious region, which is free from prostitution, the local government enacted Local Regulation No. 5 / 2007 on the Prohibition of Prostitution, which came into effect on May 1, 2007. However, the regulation has so far proved ineffective to solve the problem of prostitution. The implementation of the regulation, has been characterized by improper arrests carried out Civil Service Police Force, a problem that has sent prostitution activities underground. Consequently, risk of spreading sexually diseases has increased. Moreover, community health centers have failed to deliver regular services to sex workers because they no longer live in Parang Kusuma. Irregularity of health services provided by community health centers has led to incomplete treatment of patients. Worse still, NGOs offering reproductive health assistance services have decided to terminate their services for fear of being accused of flouting the regional regulation on prostitution.

Key Words: local regulation, prostitution, sex workers, judicial operations, reproductive health

Pengantar

Selama ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seringkali diskriminatif terutama untuk kalangan perempuan, misalnya UU Pornografi dan Perda berbasis syariat di beberapa daerah. Setidaknya, ada 27 kebijakan diskriminatif yang merugikan perempuan, baik melalui kriminalisasi perempuan (17 kebijakan) maupun melalui pengendalian tubuh perempuan oleh negara (10 kebijakan). Ke-27 kebijakan diskriminatif ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 88 kebijakan daerah yang menggunakan agama dan moralitas sebagai landasan.

⁴¹ Saat ini penulis bekerja sebagai peneliti junior di salah satu lembaga konsultan perencanaan wilayah dan permukiman di Yogyakarta. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: hellatsani@gmail.com.

Daerah Istimewa Yogyakarta tidak luput dari kebijakan diskriminatif yang ditandai dengan mulai diberlakukannya Perda No. 5 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran pada 1 Mei 2007. Berdalih menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum dengan melarang kegiatan prostitusi di seluruh wilayah, Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul ini menganggap pelacuran merupakan perbuatan yang merendahkan harkat martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesusilaan. Adanya prostitusi juga akan berdampak pada timbulnya gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat. Karena itu, praktek pelacuran harus dilarang di seluruh wilayah Kabupaten Bantul, khususnya di kawasan Pantai Parangtritis dan Parangkusumo.

Perda ini sebenarnya tidak sejalan dengan UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 18 Desember 1979. Dalam konvensi dijelaskan bahwa negara-negara peserta bersepakat untuk tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan, melakukan langkah yang tepat termasuk membuat, mengubah, atau menghapus undang-undang yang diskriminatif terhadap perempuan.⁴²

Pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa para pekerja seks adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang juga harus dilindungi. Dalam konstitusi pun tidak ada pengecualian terhadap hak-hak semua warga negara. Ketika sebuah produk kebijakan menjadikan satu kelompok warga negara tertentu sebagai sasaran diskriminasi dan kekerasan, hak-hak mereka sebagai warga negara tetap harus dilindungi. Institusi pemerintah wajib memberi jaminan kepastian hukum.

⁴²Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2004. *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Pendekatan hukum saja tidak bisa menyelesaikan masalah karena munculnya prostitusi perlu dipahami secara sosiologis, ada alasan ekonomi dan sosial yang melatarbelakangi munculnya fenomena prostitusi. Berada dalam keluarga miskin yang sulit memenuhi kebutuhan keluarga, sempitnya lapangan pekerjaan untuk berpendidikan rendah dan keahlian minim membuat perempuan dalam lingkaran masalah tersebut memilih menjadi pekerja seks. Kemudian, prostitusi menjadi tumpuan harapan menyelesaikan masalah ekonomi. Trauma dalam hubungan dan maraknya perdagangan manusia juga menjadi alasan munculnya fenomena prostitusi.

Tetapi, kebijakan ini dikeluarkan seolah bukan karena alasan kesehatan dan keamanan, melainkan beban moral. Dalam teorinya "The Embarrassed State of Reproductive Health", Terence Hull (2006: 1) melihat adanya kebijakan publik yang menyangkut kesehatan reproduksi lebih didasari rasa bersalah dan malu, *"Alasan moral berpengaruh besar dalam pertimbangan kebijakan, dan rasa malu mampu mempengaruhi semua tahap perkembangan dalam aksi meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksualitas."*

Hull kemudian membahas kata 'malu' yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya, 'malu' adalah kata kunci untuk memahami cara pandang orang Indonesia dalam kehidupannya, termasuk untuk melihat sesuatu yang dianggap bernilai atau yang mengerikan. Saat membicarakan kesehatan reproduksi, seksualitas, alat kontrasepsi, ataupun aborsi, kata 'malu' selalu muncul untuk menjelaskan ketidakpantasan antara membicarakan norma moral dengan perilaku seseorang. Penggunaan kata 'malu' sebenarnya lebih mengacu pada perasaan seseorang, namun demi suatu kepentingan dapat diatur dan dipakai sebagai alasan untuk melawan suatu latar belakang sosial. Apabila dikontekstualisasikan pada munculnya perda larangan pelacuran, pemerintah seolah ingin melepaskan diri dari rasa malu dengan adanya

tempat prostitusi di Parang Kusuma tersebut, namun juga mengetahui bahwa keberadaanya tidak dapat dihindari.

Objek wisata Pantai Parang Kusuma berada 1 km di sebelah barat Pantai Parang Tritis. Disamping wisata pantainya, Parang Kusuma juga terkenal karena tempat-tempat yang dianggap keramat dan biasa dipakai untuk melakukan ritual *kejawen*. Diantaranya adalah Watu Gilang, batu yang dipercaya sebagai tempat pertama kali bertemunya Panembahan Senopati dengan Gusti Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara. Panembahan Senopati sedang bertapa ketika Gusti Kanjeng Ratu Kidul menghampirinya dan menyampaikan berbagai ramalan masa depan sebagai Raja Mataram. Batu yang terletak tidak jauh dari bibir pantai ini hingga sekarang digunakan sebagai tempat tirakat, banyak orang yang datang meletakkan sesaji dan memanjatkan permohonan, bahkan kini disekeliling Watu Gilang dibangun pagar tembok. Tempat ini dikenal dengan nama Cepuri.

Seiring berjalannya waktu, ritual-ritual tersebut makin rutin dilakukan sehingga Cepuri semakin ramai. Pengunjung datang dari berbagai daerah. Jika bertepatan pada malam Selasa Kliwon dan malam Jum'at Kliwon, maka jumlah pengunjung yang akan memanjatkan permohonan semakin banyak. Warga sekitar memanfaatkan kondisi ini dengan membuka warung makan sederhana dengan mayoritas menu oseng-oseng anjing atau babi, tempat penitipan motor, jasa parkir, bahkan banyak pedagang dan penyewaan mainan anak yang datang dan menyulap alun-alun Cepuri menjadi pasar malam.

Tanpa diketahui pasti kapan dan bagaimana awal mulanya, ritual di Cepuri pun tak lepas dari aktivitas prostitusi, banyak perempuan yang berdatangan dan tinggal di Parang Kusuma untuk menjadi pekerja seks, “.....*angger Selo Kliwon, Jemuah Kliwon meniko full kados grebeg...tiang-tiang enom ming golek nopo butuhe, ingkang*

kagungan perlu liyane nggeh sungkeman wonten lebet Cepuri....⁴³ ("....setiap Selasa Kliwon, Jum'at Kliwon itu full seperti grebeg...para pemuda hanya mencari apa perlunya, yang punya keperluan lainnya ya sungkeman di dalam Cepuri....").

Sebagai respon dari adanya pekerja seks, banyak warga membangun penginapan di sekitar Cepuri. Kamar-kamar yang disewakan hampir selalu penuh dari malam hingga esok hari. Jika pada malam biasa seorang pekerja seks hanya mendapat lima pelanggan, maka di dua malam istimewa tersebut mereka bisa mendapat hingga 20 pelanggan. Para pekerja seks pun akan berdandan lebih maksimal untuk menarik pelanggan, karena banyak pekerja seks dari daerah lain yang sengaja datang pada malam itu untuk turut mengadu nasib sehingga persaingan lebih berat.

Di dalam pagar tembok, suasana bercampur antara yang khusyuk memanjatkan doa dengan keramaian pengunjung laki-laki yang memanfaatkan kesempatan untuk bertransaksi dengan pekerja seks. Seperti pagar ayu di helatan pernikahan, para perempuan tersebut berjejer rapi di sepanjang jalan setapak yang ada di dalam pagar. Tanpa menghiraukan dinginnya angin pantai mereka melekatkan pakaian yang terbuka dan menggoda demi menarik pelanggan. Umumnya, laki-laki yang bertransaksi berumur sekitar 30 tahun atau lebih, namun adapula beberapa yang sudah lanjut usia.

⁴³Wawancara dengan Suraksomerto, 7 Februari 2012, 15.24 WIB. Suraksomerto adalah salah seorang juru kunci yang dipercaya oleh Kraton Yogyakarta untuk menjaga Parang Kusuma sejak tahun 1973. Ditentukannya seseorang menjadi juru kunci biasanya memakai sistem keturunan, ia adalah turunan ketiga di keluarganya setelah kakek dan ayahnya

Gambar 1: Komplek Cepuri Pantai Parang Kusuma



Umur para pekerja seks bervariasi mulai dari yang masih belia, kurang lebih 18 tahun, hingga nenek-nenek usia 50 tahun. Pekerja seks yang masih muda biasanya memasang harga minimal Rp 50.000 satu kali transaksi. Sedangkan semakin tua umurnya akan semakin menurun, misalnya untuk usia 50 tahunan harga yang biasa dipatok adalah Rp 30.000 dan biasanya pelanggannya pun juga yang sudah tua.

Keberadaan prostitusi identik dengan penyebaran penyakit menular seksual di masyarakat, demi mencegah hal tersebut maka kesehatan reproduksi para pekerja seks di Parang Kusuma sudah selayaknya mendapat perhatian. Selama ini perhatian untuk kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS lebih dimotori oleh LSM, namun diimplementasikannya perda membuat pendampingan kesehatan reproduksi tersebut terpaksa berhenti.

Wahab (2008:182) mengungkapkan, proses implementasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan perubahan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi akan memantik munculnya perlawanan dari pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan tersebut. Perda Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul tidak serta-merta diimplementasikan tanpa adanya hambatan, para pekerja seks pun bereaksi walaupun

tidak secara langsung berhadapan dengan pemerintah. Protes pun datang dari kalangan LSM yang kemudian membentuk Aliansi Peduli Kebijakan Bantul. Alasannya, pemerintah sudah merencanakan pemberlakuan larangan pelacuran ini sejak tahun 2002. Perda ini merupakan salah satu upaya untuk mengimplementasikan visi Kabupaten Bantul Projotamansari sejahtera, demokratis dan agamis, yang jauh dari praktik pelacuran.⁴⁴

Sulitnya lepas dari kehidupan prostitusi dan tidak adanya alternatif pekerjaan lain yang disediakan pemerintah, memaksa mereka tetap bekerja sebagai pekerja seks di Parang Kusuma, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana strategi yang mereka lakukan agar tetap bisa bertahan di sana dan bagaimana implikasi perda tersebut terhadap kehidupan mereka. Dengan demikian, metode penelitian etnografi dengan sifatnya yang holistik-integratif, penggunaan deskripsi yang mendetail, dan menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan sudut pandang informan, dianggap paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peneliti rutin mengunjungi kos atau kontrakan pekerja seks di Parang Kusuma dan sempat menginap di sana, terlibat dalam proses transaksi seperti yang biasa dilakukan pekerja seks dengan pelanggan, negosiasi harga, namun tidak turut melakukan hubungan seksual.

Perda Larangan Pelacuran

Keberadaan Perda Larangan Pelacuran mendasari polisi maupun Satpol PP menggelar operasi yustisi terhadap pekerja seks demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebelum Perda No. 5 Tahun 2007 diimplementasikan, razia pekerja seks di Parang Kusuma sudah sering dilakukan oleh Satpol PP, Polres Bantul dan Polsek Kretek untuk menegakkan Perda Provinsi No. 18 Tahun 1954 tentang Larangan

⁴⁴www.kabarindonesia.com (Artikel tanggal 6 Agustus 2008: Nugroho Angkasa S.Pd, Pelarangan tentang Pelacuran di Bantul Yogyakarta). Diakses tanggal 15 April 2010

Pelacuran di Tempat-tempat Umum. Hasil operasi yustisi dalam menegakkan perda tersebutlah yang dijadikan Pemkab. Bantul sebagai acuan membuat Perda Larangan Pelacuran.

Maraknya praktik prostitusi dianggap menggeser status wilayah Parang Tritis dari kawasan wisata menjadi kawasan prostitusi yang berdampak pada turunnya jumlah wisatawan. Maka perda ini diharapkan bisa mengurangi jumlah pekerja seks sehingga jumlah wisatawan meningkat. Padahal, keberadaan tempat wisata dan munculnya praktik prostitusi hampir tak terpisahkan. Kedatangan wisatawan akan memunculkan permintaan terhadap penyediaan penginapan dan aktivitas prostitusi yang membuat penawaran prostitusi meningkat pula. Hubungan inilah yang membuat prostitusi sukar dihilangkan.

Razia lebih sering dilakukan pada sore dan malam hari karena pada waktu tersebut diperkirakan pekerja seks sedang bersiap-siap *mejeng*, siang hari sengaja dihindari karena pekerja seks biasanya belum beroperasi dan masih bersembunyi. Ritual malam Selasa Kliwon dan malam Jum'at Kliwon juga tak luput dari target Satpol PP. Satpol PP akan merazia tempat tersebut pada rentang waktu pukul 21.00-23.00 WIB, dan tidak akan ada razia melebihi rentang waktu tersebut karena pengunjung semakin banyak. Tempat yang dituju Satpol PP adalah rumah-rumah liar di sekitar Cepuri, masing-masing menuju titik selatan, barat, dan timur Cepuri. *"....razia tujuan awalnya ya menghilangkan pekerja seks, biar pekerja seks jangan ke situ, pulang aja ke daerahnya masing-masing...."*⁴⁵

Dari perda yang dikeluarkan, jelas tujuannya adalah untuk membersihkan Kabupaten Bantul dari keberadaan prostitusi. Tidak hanya menargetkan pekerja seks, setiap pasangan bukan suami istri yang berada di losmen-losmen saat razia berlangsung

⁴⁵Wawancara dengan Marsinem, Kasi Penyidikan dan Penindakan pada Bidang Penegakan Perda, Satpol PP, 14 Juni 2012, 09.30 WIB

akan ikut ditangkap. Bagi yang mampu menunjukkan bukti bawa mereka suami istri tentunya akan serta merta dilepaskan. Bagi yang tidak mampu menunjukkan bukti, terutama yang diketahui bahwa perempuannya adalah pekerja seks akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah Satpol PP menangkap pekerja seks, mereka akan dibawa ke kantor Satpol PP yang berada di komplek Bappeda Bantul. Setelah itu akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seperti yang tercantum pada perda. Proses tersebut biasanya berlangsung dua hari satu malam. Saat pekerja seks tertangkap dan dibawa ke kantor mereka akan diinapkan di kantor dengan fasilitas seadanya, hanya diberi tikar sebagai alas tidur lalu paginya dilakukan penyidikan. Pihak Satpol PP tidak bersedia berlama-lama menampung korban operasi yustisi karena alasan finansial.

Selain karena tidak punya tempat sendiri untuk menampung pekerja seks saat proses penyidikan, pihak Satpol PP merasa lebih aman menempatkan korban di komplek tersebut. Pada malam hari pintu gerbang komplek BAPPEDA dikunci dan dijaga ketat sehingga kemungkinan korban lari lebih kecil. Saat penyidikan, PPNS menanyakan seputar data diri, kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut, dan tarif. Dari hasil penyidikan yang berlangsung kurang lebih 10 menit, data akan diberkas dan dibuatkan berita acara untuk selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul.

Banyaknya pekerja seks yang tertangkap hingga 2-3 kali bisa dilihat bahwa sebenarnya razia dan sanksi pembayaran denda tidak bisa menyelesaikan masalah. Pekerja seks lebih memilih membayar denda dengan menjual perhiasan atau meminjam teman. Menurut data Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011, pada triwulan I tidak ada pekerja seks yang berhasil dijaring, pada

triwulan II terdapat 20 pekerja seks yang tertangkap, pada triwulan III dan IV masing-masing 34 pekerja seks.

Tabel 1: Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 Kabupaten Bantul tahun 2011

No.	Jumlah Pelanggar				Jumlah
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	-	20	34	34	88

Sumber: Bidang Penegakan Perda Satpol PP.

Dari banyaknya jumlah pekerja seks yang terjaring tiap triwulannya, bisa dilihat bahwa razia yang digelar Satpol PP tidak membuat pekerja seks meninggalkan Parang Kusuma. Mereka tetap kembali untuk bekerja walaupun pada akhirnya tertangkap lagi. Data tersebut menunjukkan bahwa operasi yustisi tidak memberikan efek jera, jumlah pekerja seks di sana tidak banyak berkurang, aktivitas prostitusi tetap berjalan. Untuk Tahun 2012, pekerja seks yang terjaring pada triwulan I berjumlah 15 orang, sedangkan untuk triwulan II belum diketahui jumlahnya karena pihak Satpol PP belum merekap data tersebut.

Di PN Bantul, para pekerja seks akan dikenai denda, membayarkan sejumlah uang yang ditentukan hakim atau subsider kurungan sesuai denda. Kurungan biasanya selama satu sampai tiga minggu di Rutan Pajangan Bantul. Jumlah denda yang harus dibayarkan tiap pekerja seks berbeda tergantung putusan hakim setelah mendengar alasan yang diberikan. Biasanya denda yang diputuskan berkisar antara Rp. 200.000, Rp. 300.000, Rp. 500.000, bahkan ada pekerja seks yang harus membayar hingga Rp. 750.000 karena sudah tertangkap beberapa kali dan tetap mengulangnya.

Terkait jadwal razia oleh Satpol PP, dibenarkan bahwa sering terjadi kebocoran informasi kepada pekerja seks sehingga mereka bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. Diduga ada orang suruhan dari Parang Kusuma yang berjaga-jaga di depan

BAPPEDA, jika ada satuan yang akan melakukan razia, orang tersebut bisa langsung menginformasikan pada pekerja seks di Parang Kusuma. Sering kali saat mobil Satpol PP akan berangkat ke Parang Kusuma tiba-tiba ada motor yang mendahului dengan kecepatan tinggi yang diduga adalah mata-mata dari pekerja seks. Suparmadi, S.IP, M.Si Kabid Penegakan Perda, Satpol PP, juga membenarkan adanya rumor bahwa kebocoran informasi berasal dari dalam, ada anggota Satpol PP yang berpacaran dengan pekerja seks di sana.

Dekatnya jarak antara Parang Kusuma dengan Kecamatan Purwosari membuat pekerja seks menjadikannya alternatif tempat menyelamatkan diri. Kecamatan tersebut sudah masuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul sehingga di luar jangkauan perda. Melihat fenomena ini, seorang aparat keamanan daerah, IN, menyadari betul bahwa losmen-losmen yang ada di Purwosari lambat laun bisa menjadi alternatif tetap karena di Parang Kusuma tidak lagi aman untuk beroperasi bagi pekerja seks.

Di Purwosari, khususnya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Parang Tritis memang terdapat banyak penginapan. Sebagai pihak yang merasa bertanggung jawab atas wilayah itu, IN menekankan perbedaan antara losmen di kedua wilayah tersebut adalah tidak adanya pekerja seks yang berdomisili di losmen Purwosari, tidak seperti di Parang Kusuma. *"....Purwosari dipakai tamu entah itu pasangan suami istri atau bukan, sedangkan losmen di bawah (istilah untuk menyebut wilayah Parang Kusuma) memiliki pekerja seks yang berdomisili sekaligus beroperasi di situ...."*⁴⁶

Jika ternyata losmen di Purwosari juga menyediakan wanita, pihak polsek memilih acuh karena tidak bisa menindak layaknya razia pekerja seks di Parang

⁴⁶Wawancara dengan IN, seorang aparat keamanan daerah, 7 Februari 2012, 11.40 WIB. Saat diwawancarai di kantornya, ia tidak mau disebut sebagai informan dari Polsek Purwosari karena wawancara yang peneliti lakukan tidak berdasar prosedur resmi tapi personal. Ia juga tidak bersedia diambil gambarnya dalam pakaian dinas karena dianggap menyalahgunakan.

Kusuma, disebabkan karena Kabupaten Gunung Kidul belum mempunyai perda yang mengatur prostitusi. Tindakan yang mereka lakukan lebih mengacu pada razia pasangan bukan suami istri. Pemilik pun tidak bisa dikenai sanksi karena terganjal masalah perijinan. Pendirian losmen di Purwosari memakai perijinan pariwisata dengan dalih menjadi faktor pendukung fasilitas pariwisata Kabupaten Gunung Kidul, meskipun kenyataannya tidak memberi kontribusi pada pariwisata setempat. Jika memang mendukung pariwisata.

Untuk operasi penangkapan, pemerintah Bantul belum pernah mengajak satuan Polsek Purwosari untuk bekerja sama, walaupun kaburnya pekerja seks ke wilayah tersebut sudah menjadi rahasia umum. Maka pihak Polsek Purwosari tidak bisa melakukan apapun, selain karena tidak adanya perda terkait, pekerja seks yang melarikan diri ke Purwosari pun biasanya sendiri, berpencar dari pasangannya, sehingga pihak Polsek Purwosari tidak memiliki bukti bahwa mereka adalah pekerja seks yang harus ditangkap.

Jabatannya sebagai aparat keamanan daerah tidak menghalangi IN untuk turut mengambil keuntungan dari keberadaan prostitusi Parang Kusuma. Ia memiliki rumah kontrakan di depan Tempat Pelelangan Hasil Ikan (TPHI) atau yang lebih dikenal dengan Pantai Pelangi. Rumah tersebut disewa oleh SD, seorang mucikari, sejak maret 2011. Berdalih hanya membantu ayahnya menagih uang kontrakan tiap bulan karena tempat kerjanya yang dekat dengan rumah tersebut, IN mengaku mengenal SD sebagai tukang pijat. Berpegang pada salah satu pasal KUHP, ia yakin tidak bisa disalahkan jika rumah tersebut disalahfungsikan oleh penyewa, yang penting adalah ia memberi ijin sesuai tujuan awal yaitu sebagai tempat tinggal sekaligus praktik pijat.

Gambar 4: Topi IN yang sedang menagih uang kontrakan



Walau seolah menutup mata dan tidak mengakui, besar kemungkinan ia mengetahui fungsi sebenarnya rumah tersebut, juga profesi SD sebagai tukang pijat sekaligus mucikari. Peneliti pernah datang di siang hari, bertepatan dengan kedatangannya untuk menagih uang bulanan, saat itu salah satu ‘anak’ SD sedang *ngamar*, pekerja seks yang bekerja pada SD itupun mengaku mengenal dan sering berjumpa dengannya. Suatu kejanggalan jika IN tidak mengetahui rumahnya dijadikan tempat prostitusi.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Bantul terhadap pekerja seks hanya sebatas tindakan pasca razia, itupun jika memang ada korban terjaring yang diserahkan Satpol PP ke dinsos. Namun, hingga kini Dinsos baru sekali menerima pekerja seks, berjumlah tiga orang pada 2010. Penanganan yang dilakukan hanya memotivasi masuk Panti Rehabilitasi di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) di Sidoarum, panti ini milik Pemerintah DIY karena daerah Bantul tidak memiliki panti sendiri. Menurut keterangan Arfin Munajah, Kasi. Rehabilitasi Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial Kabupaten, karyawan di PSKW mengaku kesulitan merehabilitasi pekerja seks.

Mereka memang ditanggung kebutuhannya seperti makan dan kebutuhan mandi, namun tidak ada yang menjamin nasib anak dan keluarganya jika mereka menjalani rehab dan tidak bekerja. Rehabilitasi dilakukan maksimal selama setahun, diberi ketrampilan seperti boga, tata rias atau salon, dan menjahit. Bagi yang bersedia menjalani rehabilitasi, mereka akan didampingi hingga mahir dan di akhir rehab akan ada ujian. Bagi yang berhasil lulus diberi sertifikat sehingga setelah keluar dari panti mereka bisa mandiri dengan mendirikan usaha sendiri atau magang di tempat usaha orang lain.

Pihak dinsos juga mendengar bahwa pernah ada pemberdayaan pekerja seks dari masyarakat itu sendiri. Tetapi kegiatan tersebut selama ini belum pernah dilaporkan secara resmi. Menurutny, ada tokoh di sana yang mengumpulkan pekerja seks untuk diberdayakan dengan latihan kerja, kegiatannya pun sederhana sesuai minat, misalnya untuk yang menyukai seni maka diarahkan ke kesenian. Tokoh yang dimaksud jelas adalah AH, namun jangan jika disebut kegiatan itu belum pernah dilaporkan secara resmi karena kegiatan pemberdayaan tersebut bekerja sama oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pelacur merupakan paradigma interaksi antara perempuan dan laki-laki di luar pernikahan. Perempuan sebagai pihak yang disewa dan laki-laki sebagai penyewa, namun laki-laki luput dari perhatian aparat penegak hukum.⁴⁷ Stigma yang muncul kemudian, perempuan adalah satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab terhadap praktik prostitusi yang ada, padahal laki-laki sebagai konsumen yang memicu permintaan berperan aktif melanggengkan prostitusi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam kasus ini bertindak sebagai pelaksana penegakan hukum di

⁴⁷Ni Putu Sawitri Nandari dalam Penanggulangan Pelacuran Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Gender.pdf

sepanjang Parangtritis dan Parangkusumo, sering kali melakukan kesalahan dalam penangkapan.

Perihal sosialisasi, tidak ada aksi langsung dari pemerintah untuk mengabarkan kebijakan ini kepada para pekerja seks. Alih-alih datang ke Parangkusumo, pada 2006 dengan alasan sosialisasi pemerintah justru memanggil seorang tokoh mucikari yang dituakan untuk datang ke DPRD. Sesampai di sana, yang terjadi adalah pemerintah memberitahukan keberadaan perda tersebut, tentu saja dengan maksud tokoh ini untuk menyebarkan informasi tersebut kepada para pekerja seks di sana. Kejadian tersebut tentu bukan sosialisasi, sehingga pekerja seks dan para mucikari menganggap pemerintah tidak mau melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan, meski mereka adalah objeknya.

Dari sisi ekonomi, perda ini jelas memupus harapan masyarakat, terutama di kawasan Parangkusuma untuk hidup lebih sejahtera. Sebelum adanya perda tersebut, kehidupan mereka didukung oleh kegiatan ekonomi dan budaya yang beraneka ragam, ditandai oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah pantai tersebut. Namun setelah adanya Perda Larangan Pelacuran, perekonomian menurun drastis dan masyarakat merasa gelisah karena sering dilakukan razia besar-besaran. Penghasilan yang diperoleh para pedagang kecil, supir bus, dan penjual di pasar ikut menurun. Beberapa pemilik rumah yang dianggap menampung pekerja seks dikenai uang denda hingga Rp 10.000.000, beberapa diantaranya bahkan tanpa melalui proses hukum. Dampak perda bukan hanya dirasakan pekerja seks pelacur, tetapi juga bagi banyak masyarakat dengan beragam mata pencarian.

Kisah dari Parang Kusuma

Awal mula keberadaan kegiatan prostitusi di Parang Kusuma tidak dapat dipastikan, selain tidak adanya sumber tertulis, keberadaannya pun didapat lewat cerita turun-temurun bahwa prostitusi sudah ada sejak dulu, tidak terlepas dari keberadaan Cepuri yang ramai pengunjung. Kebanyakan pekerja seks adalah pendatang dari Indramayu, Klaten, Gunung Kidul, dan beberapa kota lain yang kemudian tinggal di daerah tersebut di bawah naungan mucikari. Rumah kontrakan dan kost banyak dibangun untuk menampung pendatang, pemilik warung melengkapi warungnya dengan kamar-kamar, keberadaan losmen pun menjamur mulai dari losmen *ecek-ecek* hingga yang bertarif mahal dengan fasilitas lengkap.

Gambar 2: Jonggrang, salah satu kost di Parang Kusuma



Jonggrang adalah salah satu kos di Parang Kusuma, memiliki 25 kamar dengan tarif yang berbeda-beda, Rp 200.000/bulan untuk kamar dengan fasilitas kamar mandi dalam, lengkap dengan tempat tidur dan sebuah lemari kecil, dan Rp 150.000/bulan untuk kamar dengan kamar mandi luar. Jonggrang dijaga oleh seorang lelaki yang dibayar pemilik, pemiliknya sendiri tinggal di Parang Tritis.

Gambar 3: Kamar seorang pekerja seks di Joggrang



Menurut cerita seorang warga yang dituakan di sana, AH, tahun 1985 saat ia datang ke daerah tersebut, Parangkusuma sudah ramai dengan pekerja seks.⁴⁸ Kondisi prostitusi di Parang Kusuma sangat ramai. Perputaran uang diduga bisa sampai dua puluh lima juta pada malam Selasa atau Jum'at kliwon. AH pada waktu itu adalah seorang mucikari, aktif mengumpulkan pekerja seks untuk dibina dan diberdayakan dengan harapan mereka tidak lagi kembali ke pantai dan bekerja sebagai pekerja seks.

AH dulunya mempunyai aula yang sengaja dibangun untuk kegiatan pembinaan pekerja seks. Mereka diberi penyuluhan atau latihan keterampilan oleh CD Bethesda, LSM yang sejak 2002 melakukan kegiatan pendampingan bagi pekerja seks di sana. Walau aula terletak di Parang Bolong, sebelah barat Parang Kusuma, namun pekerja seks di Parang Kusuma juga termasuk dalam target pembinaan. Adapula Guyub Rukun, suatu paguyuban mucikari dan pekerja seks sehingga mempermudah LSM dan pemerintah melakukan kegiatan di sana. Programnya sederhana, arisan tiap minggu dan

⁴⁸Asiban Harjodimulyo yang akrab disapa Pak Iban ini sebelumnya adalah pengurus Komplek Resosialisasi (Resos) di Sanggarahan, Giwangan. Tahun 1977 Pemerintah Kotamadya Yogyakarta meresmikan Resos sebagai lokalisasi dengan maksud memindahkan pekerja seks yang ada di Pasar Kembang

melakukan kegiatan sosial, contohnya memberi bantuan jika ada warga yang kecelakaan atau terjadi bencana alam.

Setelah lokasi prostitusi di Parang Bolong digusur dan perda disahkan, secara otomatis pembinaan terhenti. Namun kondisi prostitusi tidak banyak berubah, para pekerja seks masih terlelap di pagi hari, siang hari beberapa mulai *nongkrong* di warung-warung, dan menjelang malam mulai banyak yang *mejeng* seperti biasa di sekitar lapangan Cepuri. Saat Kliwonan, selain jumlah pengunjung yang sedikit berkurang, keadaan tetap sama dari sebelum disahkannya perda. Para pekerja seks berjejer di dalam komplek menunggu pelanggan, transaksi yang dilanjutkan menuju kamar yang sudah disewa pekerja seks, lapangan yang penuh dengan mobil plat luar daerah, dan banyak penjual berdatangan. Hanya saja, para pekerja seks menjadi lebih waspada akan operasi yustisi, berkurangnya jumlah juga karena mereka memilih untuk tidak menetap lagi di Parang Kusuma. Mereka lebih memilih untuk datang di malam hari dan pulang pagi atau hanya datang saat malam Selasa dan Jum'at Kliwon.

PJ (40), menjadi pekerja seks di Parang Kusuma sejak 2008. Keluarganya di Sragen tidak mengetahui profesi yang sebenarnya karena mengaku bekerja sebagai pedagang kain. Ia menyewa kamar kos di Jonggrang dengan biaya sewa Rp 200.000 per bulan, di dalamnya terdapat kamar mandi, tempat tidur, lemari, dan peralatan dapur. Ia juga memiliki sebuah motor, yang dibeli patungan dengan anaknya. Sebelum adanya perda, PJ bisa meraup Rp 1.000.000 saat malam Selasa atau Jum'at Kliwon, kini ia hanya bisa mendapat 1 atau 2 pelanggan tiap harinya. Ia tidak hanya bekerja di malam hari, siang hari pun saat *mejeng* di lapangan Cepuri kadang bisa mendapat pelanggan.

Perempuan tamatan SMP ini pernah tertangkap saat Polsek Kretek melakukan razia. Saat itu ia sedang makan siang di depan kamarnya. Walau berusaha lari, polisi tetap berhasil menangkapnya. Ia dikenai denda Rp 200.000, Pujiyanti membayar denda

dengan meminjam uang pada temannya. Namun ia tidak jera, dan tetap kembali ke Jonggrang sebagai pekerja seks.

Adapula perempuan paruh baya yang akrab dipanggil BS (52), asal Purworejo. Ia menyewa sebuah kamar di samping kos Jonggrang berdinding triplek berukuran 1,5m x 1,5m dengan tarif Rp 50.000 per bulan. Di dalam kamar terdapat tempat tidur dan peralatan masak. Selain menjadi pekerja seks, ia juga berjualan makanan dan keperluan sehari-hari seperti sabun, odol, tisu, dan sampo. Berbeda dengan Pujiyanti, keluarga BS mengetahui bahwa ia menjadi pekerja seks di Parang Kusuma sejak 2002, bahkan anaknya beberapa kali datang menjenguk. BS sudah tidak seaktif dulu mencari pelanggan, tidak lagi menjajakan diri di Cepuri. Ia hanya melayani orang-orang yang sudah ia kenal dan sengaja datang mencarinya. Saat ada ritual Kliwonan pun ia datang ke Cepuri untuk membagi-bagikan kondom gratis yang didapat dari LSM Kembang atau Puskesmas Kretek.

Berbeda dengan PJ dan BS yang datang ke Parang Kusuma karena himpitan ekonomi, MY (30-an) menjadi pekerja seks karena membenci suaminya. Ia mengaku dijadikan tumbal oleh suaminya untuk mendapat kekayaan. Saat mengetahui itu ia merasa jijik dan benci kepada suaminya. Ia juga merasa bahwa Tuhan tidak melindunginya sehingga ia memilih melakukan pekerjaan yang awalnya dianggap kotor. MY tidak banyak tahu tentang perbedaan kondisi Parang Kusuma sebelum dan sesudah adanya perda, saat wawancara dilakukan, perempuan asal Tangerang ini belum ada tiga bulan tinggal di komplek Cepuri. Ia datang bersama anak perempuannya yang berusia kurang lebih 5 tahun.

Lain lagi kisah SD (56), pekerja seks yang telah berada di Parang Kusuma sejak 2002. Ia mulai berkenalan dengan *Community Development Bethesda* (CD Bethesda), LSM yang mendampingi pekerja seks dalam hal kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS.

Pernah menjadi mahasiswa membuat SD lebih aktif, mudah menerima informasi, dan pandai berkomunikasi daripada pekerja seks lainnya, CD pun mendaftarnya menjadi tangan kanan sekaligus motivator hidup sehat untuk pekerja seks.

Ia selalu menekankan pentingnya penggunaan kondom pada teman-temannya, ia sendiri pun mengaku selalu meminta pelanggannya menggunakan kondom. “....Nganggo kondom ki ora mung kepingingane bocah-bocah tapi tamune barang, ben podo-podo ora ketularan....”. (....Memakai kondom bukan hanya kepentingan anak-anak tetapi juga untuk tamu, agar tidak ada yang tertular....).

Menurut SD, keberadaan CD sangat terasa manfaatnya karena kesehatan seksual mereka sangat diperhatikan, misalnya pelayanan seperti *papsmear*, pemberian antibiotik dengan dosis tepat, dan perawatan lain jika ada yang terkena penyakit menular. Jika ada yang sakit diberi obat gratis dan jika harus menjalani perawatan lebih lanjut akan diantar ke RS Bethesda, biaya pun ditanggung oleh CD.

Setelah ditetapkannya perda yang membuatnya harus berpindah-pindah tempat, kini ia membuka membuka usaha baru sebagai ahli supranatural dan pijat akupresur, serta berjualan minuman ringan dan bir. Ia mengaku hasil penjualan bir sangat menguntungkan karena sebuah bir yang dibeli seharga Rp 15.000 dapat dijual dengan harga Rp 25.000. Usaha lainnya adalah berjualan nomer buntut atau dikenal dengan togel. Beberapa anggota keluarganya mengetahui profesi tersebut, namun tidak bisa melarang karena selama ini mereka dibiayai oleh SD.

Dari segelintir contoh di atas, pendidikan akhir mayoritas pekerja seks di sana adalah SMA, ada beberapa yang hingga perguruan tinggi namun tidak selesai. Hal tersebut turut melatarbelakangi alasan mereka memilih menjajakan diri daripada mencari pekerjaan lain. Profesi ini tidak memerlukan keahlian dan ketrampilan, namun tetap bisa mendatangkan uang, beberapa dari mereka justru kecanduan menjadi pekerja

seks karena hal tersebut. Mereka terbiasa mencari uang bermodalkan tubuhnya, uang pun langsung di dapat setelah mereka selesai berhubungan.

Maka dari itu, Perda Larangan Pelacuran dianggap mengganggu kestabilan mereka dalam mendapatkan uang dengan mudah. Pelanggan menjadi berkurang dan mereka harus memikirkan siasat untuk tetap bertahan misalnya dengan membuka pratik pijat, meninggalkan nomor telepon di suatu warung sehingga jika ada yang mencari bisa langsung dihubungi, atau harus mencari tempat lain di luar Kabupaten Bantul untuk melakukan praktik prostitusi. Di sisi lain, perda tidak efektif untuk menghilangkan prostitusi. Tingginya kemampuan mobilitas para pekerja seks membuat mereka tidak perlu berdiam di satu tempat untuk mencari pelanggan, membuktikan bahwa praktik prostitusi dapat terus berjalan walaupun perda telah disahkan.

Kebanyakan pekerja seks yang ada di Parang Kusuma berusia sekitar 40-50an, meski beberapa masih muda namun jumlahnya lebih sedikit. Laki-laki yang datang pun usianya tidak jauh berbeda. Dari segi pekerjaan, pelanggan yang datang biasanya adalah tukang ojek, satpam, pedagang keliling, tukang becak, penjaga parkir, dll. Salah satu contoh adalah BJ, pemilik warung sederhana di Parang Tritis termasuk pelanggan yang sering datang ke Cepuri untuk berhubungan dengan pekerja seks. Menurutny, ia telah menuruti segala keinginan dan kebutuhan istri dan anak-anaknya sehingga mereka tidak lagi berhak melarang apapun yang dilakukannya. Istri dan anak-anak BJ mengetahui kebiasaannya di Cepuri, tetapi tidak bisa melarang.

Selain dengan pelanggan yang datang, ada beberapa pekerja seks yang berhubungan dekat, atau istilahnya *gendakan*, dengan anggota Satpol PP atau aparat daerah setempat. Dari obrolan lepas, pekerja seks yang mempunyai *gendak* diuntungkan karena mendapat perlindungan, anggota Satpol PP atau keplisian setempat bisa membocorkan informasi tentang waktu dan target tujuan razia, sehingga pasangannya

bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. Namun, memiliki *gendak* juga membuat pendapatan berkurang, mereka tidak bisa leluasa mencari pelanggan karena *gendak* akan cemburu. Di sisi lain, laki-laki tersebut juga hidup dari uang pekerja seks.

Akses Kesehatan Reproduksi

Puskesmas Kretek sebagai puskesmas yang mencakup wilayah Parang Kusuma mempunyai program layanan kepada pekerja seks di sana. Pihak puskesmas tiap bulan rutin datang membawa peralatan dan obat untuk memeriksa. Kegiatan ini sudah sejak lama dilakukan. Hingga pada September 2009, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul didanai oleh Global Fund menyisipkan klinik Infeksi Menular Seksual (IMS) sebagai program tambahan sehingga puskesmas mempunyai layanan spesifik untuk IMS. Tidak hanya kepada untuk pekerja seks, layanan juga disasarkan kepada pelanggan dan warga seluruh Bantul. Awalnya, puskesmas menargetkan pekerja seks yang datang ke klinik, tetapi tidak berhasil karena kebanyakan mereka *enggan*, malu, atau sibuk sehingga pihak puskesmas yang harus datang ke lokasi.

Khusus untuk IMS, formasi tim yang terdiri dari seorang dokter, bidan, administrasi, dan laboran formasinya harus selalu lengkap saat mendatangi pekerja seks karena layanan mereka bersifat *one day service*. Tim ini pertama-tama melakukan anamesa atau mendata identitas hingga keluhan. Kemudian melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel duh atau lendir pasien baik perempuan maupun laki-laki. Beberapa laki-laki ini biasanya adalah pelanggan yang kebetulan berada di sana pada siang hari dan bersedia diperiksa. Duh langsung diperiksa laboran saat itu juga sehingga hasilnya bisa langsung diketahui dan diobati. Jika ada yang harus dirujuk, puskesmas ini bekerja sama dengan RS Panembahan sehingga pasien bisa langsung diantar.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) memperkenalkan beberapa LSM untuk membantu aktivitas puskesmas menangani pekerja seks di Parang Kusuma seperti LSM Kembang, Fiesta (fokus pada ODHA), Kebaya (fokus pada waria), dll. Namun, LSM Kembang lah yang paling sering bekerja sama dengan puskesmas karena sesuai dengan fokus mereka yaitu menjangkau pekerja seks, memberi informasi tentang pentingnya akses kesehatan. Kerja sama yang dilakukan antara puskesmas dan LSM Kembang tidak selalu dalam wujud datang ke Parang Kusuma bersama-sama, tapi juga bertukar informasi. KPA biasa membantu menyediakan kondom untuk dibagikan gratis pada pekerja seks. Puskesmas juga bekerja sama dengan Dinkes walaupun hanya untuk obat, namun jika ada obat-obat khusus IMS yang kebetulan tidak dimiliki oleh Dinkes maka puskesmas akan menggunakan dana dari Global Fund untuk membelinya sendiri.

Gambar 6: Situasi saat Puskesmas Kretek Mengadakan Layanan



Pihak puskesmas biasanya dibantu orang-orang khusus yang memang sudah dipersiapkan, seperti Mbak Anik yang tinggal di dekat Pantai Pelangi, Pak Watin di dekat lapangan Cepuri, dan Mbak Sri di timur cepuri dekat Jonggrang (sebuah kost pekerja seks). Sebelum berangkat, pihak puskesmas akan menghubungi orang-orang tersebut yang kemudian informasi akan disebarkan pada pekerja seks agar datang ke tempat yang sudah ditentukan. Saat pemeriksaan, paling banyak pekerja seks yang datang berjumlah 15-20 orang. Sesungguhnya puskesmas mempunyai data jumlah

orang yang menerima pemeriksaan IMS di tahun 2011 namun jumlah tersebut adalah keseluruhan pasien sehingga tidak bisa dipastikan berapa jumlah warga dan pekerja seks.

Kendala yang ditemui biasanya karena pekerja seks berpindah-pindah dan tidak selalu datang saat layanan, sehingga untuk mereka yang harus menjalani pemeriksaan lanjutan tidak bisa lagi diketahui riwayat penyakitnya, padahal bagi pekerja seks yang terdeteksi berpenyakit harus dilakukan pemeriksaan lagi seminggu atau tiga bulan setelahnya.

Tabel 1: Jumlah Pasien Klinik IMS Puskesmas Kretek Tahun 2011 wilayah Parang Kusuma

No.	BULAN	Jumlah Pasien
1	Januari	12
2	Februari	16
3	Maret	18
4	April	18
5	Mei	10
6	Juni	11
7	Juli	23
8	Agustus	0
9	September	9
10	Oktober	12
11	November	5
12	Desember	14
JUMLAH		148

Sumber: Rekapitulasi Jumlah Layanan Klinik IMS Puskesmas Kretek Tahun 2011

Berdasarkan data di atas, pada kunjungan untuk wilayah Parang Kusuma terlihat bahwa jumlah pasien dari Parang Kusuma tiap bulannya cenderung bertambah walau tidak teratur. Inilah yang menyebabkan pengobatan kepada pekerja seks sulit dilakukan hingga tuntas. Kendala lain yang dihadapi adalah menyangkut perda, awalnya klinik ini sulit mengadakan pemeriksaan karena banyak pekerja seks yang ketakutan dan curiga jika puskesmas ini bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaring mereka. Pihak puskesmas berusaha meyakinkan para pekerja seks bahwa mereka tidak bekerja sama untuk operasi yustisi, dari awal pendirian puskesmas sudah melakukan rapat lintas

sektoral dengan kepolisian (polsek khususnya), KORAMIL, kelurahan, dan kecamatan, dengan tujuan mengumumkan pendirian klinik ini dan program menitikberatkan pencegahan penyakit bagi pekerja seks, bukan mendukung pelegalan prostitusi.

Disahkannya perda tidak mempengaruhi pelayanan yang diberikan puskesmas, meskipun ada perda yang melarang kegiatan apapun yang berhubungan dengan pekerja seks, Puskesmas Kretek hingga sekarang masih bisa melakukan pelayanan dengan baik, hal ini dikarenakan sebelum beroperasi pihak puskesmas sudah memaparkan niat mereka kepada beberapa instansi terkait. Puskesmas adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, terbukti aktivitas yang bersentuhan dengan pekerja seks di daerah yang termasuk lingkup perda tidak dilarang. Padahal perda inilah yang membuat beberapa LSM sebelumnya menghentikan pendampingan pekerja seks dan layanan kesehatan reproduksi kepada mereka, selain karena LSM-LSM tersebut takut tersentuh perda, mereka juga sulit mengumpulkan pekerja seks yang telah berpencar dan tidak menetap di Parang Kusuma sehingga sulit dikumpulkan.

Klinik IMS di puskesmas tersebut layaknya program lanjutan dari dikeluarkannya Perda Larangan Pelacuran, di satu sisi pemerintah sudah melakukan kewajibannya untuk meniadakan prostitusi, namun di sisi lain pemerintah tidak bisa memungkiri bahwa prostitusi tidak bisa hilang sehingga puskesmas dijadikan alat untuk memelihara kesehatan reproduksi mereka.

Penutup

“Prostitusi di Parangkusumo tidak akan pernah hilang, walaupun pemerintah berusaha menghentikannya dengan Perda atau peraturan lainnya, karena di sinilah tempat

Panembahan Senopati dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul *olah asmoro*."⁴⁹ Anekdote tersebut dan ritual kejawen di Cepuri yang berkorelasi dengan munculnya prostitusi seolah menjadi legitimasi kultural, bahwa Parang Kusuma adalah tempat prostitusi yang tidak bisa dihilangkan. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan sehingga pendekatan hukum saja tidak akan menyelesaikan masalah. Sehingga sebaiknya pemerintah melibatkan semua pihak terkait saat proses penyusunan kebijakan, pekerja seks tidak bisa dianggap sekadar objek sehingga suara dan usulannya harus didengar.

Pemerintah semestinya memperhatikan tradisi lokal, legitimasi kultur yang melandasi prostitusi di Parang Kusuma sehingga penanganan bisa melalui pendekatan lokal dan budaya. Lembaga atau dinas yang bertanggung jawab atas masalah prostitusi hendaknya diperjelas, koordinasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan tindakan. Melakukan kerjasama dengan dinas lain juga perlu dilakukan, dengan demikian bisa diadakan kerjasama antar daerah sekitar untuk mencari alternatif lapangan pekerjaan, baik untuk masyarakat Parang Kusuma maupun pekerja seks yang ada di sana. Puskesmas sebagai representasi pemerintah hendaknya menggandeng kembali tokoh-tokoh, baik dari masyarakat maupun pekerja seks dalam layanan rutin yang dilakukan agar para pekerja seks kembali bersimpati dan percaya pada mereka, sehingga bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan. Para pekerja seks pun harus proaktif terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Satpol PP dan aparat setempat seharusnya memiliki paradigma pro-HAM dan anti diskriminasi terhadap perempuan saat menegakkan perda supaya kasus salah tangkap dan tindakan semena-mena pada pekerja seks tidak terjadi. Publik harus turut mengawasi kinerja Satpol PP dan aparat setempat dalam menangani prostitusi.

⁴⁹ *Olah asmoro* adalah istilah bahasa Jawa yang dipakai mbak Sinta untuk menyebut hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Masyarakat, LSM, Lembaga Ombudsman Daerah, dan *civil society* lainnya harus waspada terhadap penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan aparat.

Referensi

Hull, Terence H. Dkk. 1997. *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*.

Sinar Harapan: Jakarta Pusat

Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2004. *Hak Azazi Perempuan*

Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender. Yayasan Obor

Indonesia: Jakarta

Sedyaningsih, Endang Rahayu. 2010. *Perempuan-perempuan Kramat Tunggak*. PT

Gramedia: Jakarta

Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. PT Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta

Stake, Robert E. 1995. *The Art of Case Study Research*. Sage Publication, Inc.: Thousan

Oaks, California

Widilastuti, Istirul. 2010. Tesis "*Respon Stakeholder terhadap Perda No. 5 Tahun 2007*

tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul", Program Studi Magister

Administrasi Publik, UGM

www.kabarindonesia.com (Artikel tanggal 6 Agustus 2008: Nugroho Angkasa S.Pd,

Pelarangan tentang Pelacuran di Bantul Yogyakarta). Diakses tanggal 15 April 2010.